

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Tandoro)

Pertumbuhan ekonomi akan dapat tercapai apabila perekonomian mengalami peningkatan proses produksi barang dan jasa secara terus menerus diberbagai sektor atau kegiatan ekonomi masyarakat. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi suatu daerah antara lain: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan kemajuan teknologi. Untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi maka sumber daya manusia, sumberdaya alam harus tersedia dan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi (Sadono)

Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang bidang ekonomi

Pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pertumbuhan, dalam artian bahwa dengan adanya pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan, dimana pertumbuhan dalam hal ini dapat berupa pengembangan atau perluasan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat, dan pertumbuhan akan terjadi akibat adanya pembangunan (Basuki dan Prawoto, 2014)

Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah pendapatan yang diterima. oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahu

tertentu dalam suatu daerah (Sukirno, 2006). Apabila nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah meningkat, maka jumlah output seluruh unit ekonomi juga akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, Berikut adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi di 6 Provinsi di Pulau Jawa:

**Tabel 1.1**

**Pertumbuhan Ekonomi di 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun**

**2014 – 2017**

Provinsi	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	5.91	5.91	5.88	6.22
<i>Jawa Barat</i>	<i>5.09</i>	<i>5.05</i>	<i>5.66</i>	<i>5.29</i>
Jawa Tengah	5.27	5.47	5.27	5.27
D I Y	5.17	4.95	5.05	5.26
Jawa Timur	5.86	5.44	5.57	5.45
Banten	5.51	5.45	5.28	5.71

Sumber : BPS Jawa Barat (2018)

Bedasarkan table 1.1 pertumbuhan ekonomi di 6 Provinsi di pulau Jawa meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mengalami penurunan setiap tahunnya. Itu di sebabkan oleh perlambatan pertumbuhan di kota / kabupaten. Perekonomian Provinsi Jawa Barat didominasi oleh empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang yang merupakan pusat perdagangan dan daerah sentra industri pengolahan di Jawa Barat. Sementara itu, kabupaten/kota dengan

peranan terkecil adalah Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon

Selain itu ada angkatan kerja yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurut Anggoro dan Soesatyo (2015) bahwa tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan membuat penciptaan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat minim sehingga penyerapan tenaga kerja pun tidak maksimal dan akhirnya mengakibatkan pengangguran. Dalam penelitian ini digunakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat diartikan sebagai seberapa banyak tenaga kerja yang tersedia untuk proses produksi. Berikut ini adalah tabel persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di 6 Provinsi di Pulau Jawa:

**Tabel 1.2**

**Presentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun**

**2014 – 2017**

Provinsi	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	66.61	66.39	66.91	61.97
<i>Jawa Barat</i>	<i>62.77</i>	<i>60.34</i>	<i>60.65</i>	<i>63.34</i>
Jawa Tengah	69.68	67.86	67.15	69.11
D.I.Y	71.05	68.38	71.96	71.52
Jawa Timur	68.12	67.84	66.14	68.78
Banten	63.84	62.24	63.66	62.32

Sumber : BPS Jawa Barat (2018)

Berdasarkan tabel 1.2, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 6 Provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi setiap tahunnya. TPAK tertinggi berada di Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di atas, TPAK mengalami penurunan sebesar 2,43% pada tahun 2015. Meski begitu, TPAK berhasil merangkak naik pada tahun 2016 hingga 2017. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dikarenakan pendapatan yang rendah, oleh karenanya menjadikan masyarakat lebih menetapkan pilihan untuk bekerja dibanding mengurus rumah tangga dan bersekolah. Keluarga dengan pendapatan yang terbatas cenderung memiliki anggota keluarga yang bekerja daripada mengurus rumah tangga dan bersekolah. Menurut Tjiptono (dalam Fudloli dan Sadikin, 2015: 19), keputusan keluarga yang mewajibkan anak atau istri untuk bekerja akan menjadikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah angkatan kerja meningkat. Kebalikannya, keputusan keluarga yang tidak mengharuskan anak serta istri turut bekerja akan menjadikan tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Uraian tersebut

memperlihatkan bahwa pendapatan yang rendah yang dimiliki penduduk usia kerja dapat menjadikan penduduk lebih memilih bekerja dibanding mengurus rumah tangga atau bersekolah, sehingga semakin banyak jumlah angkatan kerjanya. Banyaknya penduduk yang termasuk angkatan kerja akan memicu peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Selanjutnya yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan, di mana pendidikan seorang pekerja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini digunakan data rata-rata lama sekolah. Menurut Kamaludin (1999), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Ini dikarenakan seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kemampuan atau skill yang beragam, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan akan mengurangi pengangguran. Berikut ini adalah tabel rata-rata lama sekolah di 6 Provinsi di Pulau Jawa

**Tabel 1.3**

**Rata – Rata Lama Sekolah di 6 Provinsi di Pulau Jawa**

**Tahun 2014 – 2017**

<b>Provinsi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
DKI Jakarta	10.54	10.7	10.88	11.02
<i>Jawa Barat</i>	<i>7.71</i>	<i>7.86</i>	<i>7.95</i>	<i>8.14</i>
Jawa Tengah	6.93	7.03	7.15	7.27
D.I.Y	8.84	9	9.12	9.19
Jawa Timur	7.05	7.14	7.23	7.34
Banten	8.19	8.27	8.37	8.53

Sumber : BPS Jawa Barat (2018)

Berdasarkan tabel 1.5, rata-rata lama sekolah di 6 Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Jawa Barat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seorang tenaga kerja maka semakin tinggi juga kemampuan yang dimiliki. Karena banyak suatu perusahaan yang memiliki persyaratan pekerjaan adalah tingkat pendidikan yang tinggi, maka dari itu pendidikan sangatlah penting

Upaya mencerdaskan bangsa ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003). Menurut Sumitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa melalui pendidikan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperluas kemampuannya dan mengatur kehidupan secara wajar. Untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, Tingkat Rata – Rata lama sekolah yang meningkat juga mempengaruhi investasi yang ada di Jawa Barat, Harrod-Domar di dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Investasi merupakan mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber- sumber ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan output.

Peningkatan kapasitas produksi dalam kegiatan investasi diperoleh melalui kegiatan investasi, baik yang merupakan investasi swasta (*Private Investment*) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan nilai *output* suatu daerah, mempercepat pembangunan ekonomi, dan membantu industrialisasi dalam membangun modal *overhead* ekonomi serta dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana perkembangan realisasi investasi

PMDN dan PMA seluruh provinsi di Pulau Jawa selama kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2014 – 2017.

**Tabel 1.4**

**Realisasi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di 6 Provinsi di Pulau Jawa**

**Tahun 2014 – 2017**

<b>Provinsi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
DKI Jakarta	17811,5	15512,7	12216,9	47262,3
<i>Jawa Barat</i>	<i>18726,9</i>	<i>26272,9</i>	<i>30360,2</i>	<i>38390,6</i>
Jawa Tengah	13601,6	15410,7	24070,4	19866,0
D.I.Y	703,9	362,4	948,6	294,6
Jawa Timur	38132,0	35489,8	46331,6	45044,5
Banten	8081,3	10709,9	12426,3	15141,9

Sumber : BPS Jawa Barat

Bedasarkan Tabel 1.4 diatas, realisasi investasi PMDN seluruh Provinsi di Pulau Jawa selama kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2014 – 2017 beberapa ada yang flukuatif, seperti pada Provinsi D.I.Y dan Banten. Sementara untuk provinsi lainnya mengalami kenaikan seperti pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan masing – masing provinsi memiliki nilai realisasi investasi PMDN tertinggi pada tahun 2016.

**Tabel 1.5**

**Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri/Asing (PMA) di 6 Provinsi di Pulau**

**Jawa Tahun 2014 – 2017**



<b>Provinsi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
DKI Jakarta	4509,4	3619,4	3398,2	4595,4
<i>Jawa Barat</i>	<i>6562,6</i>	<i>5738,7</i>	<i>5470,9</i>	<i>5142,9</i>
Jawa Tengah	463,4	850,4	1030,8	2372,5
D.I.Y	64,9	89,1	19,6	36,5
Jawa Timur	1802,5	2593,4	1941,0	1566,7
Banten	2034,6	2542,0	2912,1	3047,5

Sumber : BPS

Bedasarkan Tabel 1.5 diatas dapat dilihat realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri/Asing menurut seluruh provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2017- 2019. Berdasarkan data tersebut realisasi investasi PMA seluruh provinsi di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif. Berdasarkan keenam provinsi di pulau Jawa dari tahun 2014 – 2017 provinsi Banten merupakan provinsi dengan realisasi investasi PMA tertinggi diantara provinsi lainnya di pulau Jawa, Realisasi investasi baik PMDN maupun PMA di Pulau Jawa terbilang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di luarPulau Jawa. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa lebih merata dan memadai dibandingkan luar Pulau Jawa, sehingga banyak investor yang lebih tertarik berinvestasi di Pulau Jawa.

Menurut Todaro (2004), modal pembangunan yang penting selain investiasialah sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar dan

diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki *skill* yang bagus akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi di suatu daerah. Robert Solow dan Trevor Swan mendefinisikan proses pertumbuhan *output* bergantung pada penambahan penyediaan faktor produksi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk sebagai penyedia tenaga kerja (disamping akumulasi kapital serta tingkat kemajuan teknologi). Oleh karena itu, sampai mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, jumlah tenaga kerja, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi perubahan pada tingkat *output* yang dihasilkan (PDB pada tingkat nasional dan PDRB) pada tingkat daerah (Arsyad, 2016).

Berdasarkan fenomena tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH ANGKATAN KERJA, RATA – RATA LAMA SEKOLAH DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA BARAT TAHUN 2000 - 2020”**.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 – 2017 ?
2. Bagaimana pengaruh rata – rata sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 – 2017 ?

3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 – 2017 ?
4. Barat pada tahun 2014 – 2017 ?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh angkatan kerja, rata rata lama sekolah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2014 – 2017

## **1.3 Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat akademik dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis/akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan Pertumbuhan tingkat *output* Pulau Jawa, serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan terkait analisis Pengaruh angkatan kerja, rata – rata lama sekolah, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

1. Melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Pasundan.

2. Sebagai salah satu media latihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Sebagai bahan referensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Kota Bandung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Boediono, “pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan Output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, Output perkapita dan jangka panjang. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian. Jadi, “pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat”.

Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang - bidang ekonomi

Menurut Suryana (2000), dalam bukunya mengemukakan pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :

1. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus- menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Sukirno (2011:13-14), di dalam buku (Lincolyn Arsyad). “perbedaan penting dengan pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita”. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik

Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidaknya.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi sesudah Keynes, yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrod. Domar mengemukakan teori tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 1947 dalam *American Economic Journal*. Sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Maka, pada dasarnya teori tersebut sebenarnya dikembangkan oleh dua ahli ekonomi tersebut secara terpisah. Tetapi, karena inti dari teori tersebut sama, maka lebih dikenal dengan teori Harrod-Domar (Sukirno, 2006).

Teori Harrod-Domar merupakan teori perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap, karena tidak menyinggung persoalan mengatasi masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Analisis yang dibuat oleh Harrod-Domar bertujuan untuk menutupi kelemahan ini. Dengan perkataan lain, teori Harrod-Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth* yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal akan selalu berlaku dalam perekonomian (Sukirno, 2006).

Dalam teori Harrod-Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori tersebut menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisis Keynes, yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya

perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang.

Di samping itu, sesuai dengan pendapat Keynes, teori Harrod-Domar menganggap pula bahwa penambahan dalam kesanggupan memproduksi ini tidak secara sendirinya akan menciptakan penambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Harrod dan Domar sependapat dengan Keynes bahwa penambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh penambahan dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat.

Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah-dan pertumbuhan ekonomi tercipta-apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Bertitik tolak dari pandangan ini, analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan syarat yang diperlukan supaya dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa ke masa (yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya) akan selalu sepenuhnya digunakan (Sukirno 2006).

### 2.1.3 Pertumbuhan Ekomi Neo – Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa Neo Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

Dalam Sukirno (2006) Teori pertumbuhan neo-klasik mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh dua penulis Amerika, yaitu Charles Cobb dan Paul Douglas, yang dikenal dengan *fungsi produksi Cobb-Douglas*. Fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Di mana:

$Y_t$  = tingkat produksi

pada tahun t  $T_t$  = tingkat

teknologi pada tahun t

$K_t$  = jumlah stok barang-barnang modal

pada tahun t  $L_t$  = jumlah tenaga kerja pada

tahun t

$\alpha$  = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

$\beta$  = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan  
satu unittenaga kerja



#### **2.1.4 Angkatan Kerja**

Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.<sup>7</sup> Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang bekerja . Menurut Mulyadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa.

Angkatan kerja yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu:

1. Penduduk yang bekerja menurut kelompok umur,yang tujuannyaadalahmelihat kontribusi pekerja muda,pekerja prima,dan pekerja tua dalamduniapasar tenaga kerja.
2. Penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang tujuannyaadalahmelihat seberapa besar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerjadengantingkat keahlian atau keterampilan tertentu atau sesuai dengantingkatpendidikannya.
3. Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha,dimana distribusi pendudukyang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomiapa yang paling banyak menyerap tenaga kerja
4. Penduduk menurut status pekerjaan,dimana penduduk seseorangdalammelakukan pekerjaan di suatu usaha atau kegiatan.
5. Penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja,yaitu proporsi pendudukyang bekerja menurut jumlah jam kerja.

Menurut Suherman Rosyidi, (2014:56) “Tenaga Kerja adalah manusia (atau Labor) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksudkan di sini memang bukanlah sekedar labor atau tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi yaitu human resources (sumber daya manusia)”.

#### **2.1.4.1 Hubungan Angkatan kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro (2003) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.

Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Samuelson (1996) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu ( $q$ ) adalah  $q = f(K, L)$  dimana  $k$  merupakan modal dan  $L$  adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara  $K$  dan  $L$  maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

### **2.1.5 Rata – Rata Lama Sekolah**

Menurut Todaro (2000), menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti.

Rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan:

$$IRLS = \frac{RLS}{Jumlah\ Penduduk}$$

Menurut Todaro (2000), tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk dapat memaksimalkan selisih antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang

diperkirakan, maka strategi optimal bagi seseorang adalah berusaha menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik dari pada orang yang bekerja lebih awal

### **2.5.1.1 Hubungan antara Angkatan kerja dan Pertumbuhan Ekonomi**

Sollow menekankan bahwa peranan ilmu pengetahuan dan investasi sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dari teori Sollow tersebut kemudian dikembangkan menjadi teori baru pertumbuhan ekonomi (The new growth theory) yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan dasar dari pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2011).

Menurut Mankiw (2003) suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya ceteris paribus akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Melliana & Zain (2013) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan indeks kualitas sumber daya manusia dengan penemuan yakni faktor pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pembangunan yang terencana seperti anggaran untuk pendidikan, dengan peningkatan angka partisipasi sekolah.

Handayani et al (2016) juga memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### **2.6.1 Investasi**

Menurut Murbanto sinaga, (2016:71) “Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada”. Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal atau akumulasi modal. Dengan demikian, di dalam makro ekonomi pengertian investasi tidak sama dengan modal. Dalam makro ekonomi , investasi memiliki arti yang lebih sempit yaitu jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambahkan stok modal dalam periode tertentu. Sedangkan modal merupakan stok ketika nilai uang dari gedung-gedung, mesin-mesin, dan inventaris lainnya adalah tetap pada suatu waktu”.

Inventasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan, menambah/menciptakan nilai hidup (penghasilan dan kekayaan). Investasi bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga non fisik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia

Investasi merupakan suatu faktor penting bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) suatu negara maupun daerah, peningkatan output dan pengurangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan investasi mampu memberikan sumbangan modal atau kapital dalam proses produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masadepan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja (Sukirno, 2007)

### 2.6.1.1 Teori Investasi

#### a. Teori Investasi Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Model ini menjelaskan dengan asumsi agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang mantap (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap serta perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y = C + I$ )

Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal. Untuk menciptakan pertumbuhan yang mantap maka investasi harus senantiasa ditingkatkan, hal ini memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh (Jhingan, 2000).

Menurut Sukirno (2006), Harrod-Domar dalam teorinya tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli ekonomi terdahulu yang menekankan peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi berbeda dengan pandangan kaum Klasik dan Keynes, yang memberikan perhatian pada satu aspek saja dari pembentukan modal, teori Harrod-Domar menekankan kedua aspek dari pembentukan modal. Menurut pendapat kaum Klasik, pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu masyarakat untuk meningkatkan produksi. Bagi kaum Klasik, pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah barang-barang modal dalam masyarakat.

Kalau kesanggupan tersebut bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta.

b. Teori Investasi Neo-Klasik

Menurut neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi, dan demikian pula sebaliknya. Sebagai akibat adanya investasi yang bertambah maka tingkat bunga naik yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah tabungan. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga turun dan harga barang-barang modal kembali turun, hasrat menabung turun. Pada tingkat perkembangan ini, akumulasi modal berakhir, dan perekonomian statis atau tidak mengalami perkembangan (Suryana, 2000).

### **2.6.1.2 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan pengertian dari modal dalam negeri dalam pasal 1 yaitu sebagai berikut:

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Modal Dalam Negeri" ialah

Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah : Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang- undang ini.



Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal maupun penanaman modal) meliputi pengeluaran dan perbelanjaan sebagai berikut (Sukirno, 1994):

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi neto.

### **2.6.1.3 Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)**

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu upaya dalam

meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

PMA terdiri atas :

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), merupakan investasi yang hanya melibatkan aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional.
2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

#### **2.6.1.4 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal asing karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Investasi penanaman modal asing, jika dikelola dengan baik maka akan mendapat kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan baik guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara teori, PMA berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat beberapa jalur. Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto (PDB), total ekspor (X) dan kesempatan kerja (KK). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan X berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya

peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M). Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut: adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya; jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat di negara penerima.

Dalam kata lain, semakin besar komponen M dari sebuah proyek PMA. Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor pendapatan nasionalnya. Walaupun tidak dapat menggambarkan dengan pasti pertumbuhan ekonomi suatu negara, pendapatan nasional terkadang masih dijadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara dapat ditinjau dari pendapatan nasional negara tersebut. Cara investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, simpelnya jika kita analogikan dari pedesaan. Dimana seorang petani yang menginvestasikan hartanya untuk membeli peralatan untuk menjalankan aktivitasnya sebagai petani dan bisa menghasilkan pendapatan. Begitu juga tentang cara investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan nasional. Yaitu dimana ketika suatu

negara bisa mengadakan suatu proyek investasi yang bisa menghasilkan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat lalu perlu diketahui bahwa bila adanya kenaikan tingkat suku bunga bisa mengakibatkan turunnya investasi dan menurunnya GDP (Gross Domestic Product) riil yang ada domestik sepenuhnya terserap. Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah. Implikasi kebijakan dari adanya hubungan timbal balik antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan tersebut adalah pada pembuatan proyeksi/per-kiraan kebutuhan investasi tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Dengan memegang asumsi bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi, maka dalam membuat proyeksi investasi harus mem-perhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi; dan sebaliknya dalam memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi, variabel investasi harus dijadikan salah satu faktor penentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali dilihat dari perkembangan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Ahmad Jazuli Rahman (2016) “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014”	<p><b>Variabel bebas :</b> Investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja</p> <p><b>Variabel terikat :</b> PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten</p> <p><b>Metode Analisis :</b> Model Regresi Data Panel</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara serentak Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan hasil F Statistik 3,55 lebih besar dari F Tabel yaitu 2,38. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).</p>
2	Novita Panelewen, Josep Bintang Kalangi dan Een N. Walewangko (2020) “Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	<p><b>Variabel bebas :</b> Investasi dan tenaga kerja</p> <p><b>Variabel terikat :</b> PDRB di Kota Manado</p> <p><b>Metode Analisis :</b> Analisa regresi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB di Kota Manado. Secara parsial investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, tenaga kerja berpengaruh</p>

	(PDRB) di Kota Manado”.	berganda dengan program SPSS 22.0	positif dan signifikan terhadap PDRB.
3	Mikha Lola Melyani Silaen dan Astrid Maria Esther (2015) “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Di Provinsi Jawa Barat.”	<p><b>Variabel bebas :</b> Investasi, dan tenaga kerja</p> <p><b>Variabel terikat :</b> PDRB sektor industri di Jawa Barat</p> <p><b>Metode Analisis :</b> Model Regresi Analisis Data Panel</p>	Berdasarkan analisis data panel, variabel investasi dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri di Provinsi Jawa Barat.
4	Nur Feriyanto (2014) “ <i>Determinant of Gross Regional Domestic Product (GRDP) In Yogyakarta Special Province</i> ”	<p><b>Variabel bebas :</b> Jumlah orang bekerja, Investasi, dan Jumlah wisatawan</p> <p><b>Variabel terikat :</b> PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p><b>Metode Analisis :</b> <i>Multiple Regression and Partial Adjustment Model</i></p>	Hasilnya analisis regresi berganda menunjukkan bahwa jumlah orang bekerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PDRB, sedangkan investasi dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB. Selanjutnya, berdasarkan model penyesuaian parsial, terjadi proses penyesuaian yang tinggi pada akumulasi PDRB.
5	Mertha Endah Ervina dan I Gede Nyoman Mindra Jaya. (2019). “ <i>Analyzing Factors Affecting GRDP in Indonesia Using</i>	<p><b>Variabel bebas :</b> Jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, Pengeluaran pemerintah,</p>	Variabel yang dirujuk adalah jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah,, penanaman modal dalam

## 2.1 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran nyata dari bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi tersebut berjalan, sedangkan tingkat PDRB merupakan suatu gambaran dalam kegiatan perekonomian pada suatu daerah yang akan membentuk angka PDB pada tingkat nasional.

Menurut Suherman Rosyidi, (2014:56) “Tenaga Kerja adalah manusia (atau Labor) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksudkan di sini memang bukanlah sekedar labor atau tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi yaitu human resources (sumber daya manusia)”.

Menurut Todaro (2000), menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan

Investasi baik PMDN maupun PMA juga sebagai salah satu sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi (*output*). Kaum Klasik beranggapan bahwa akumulasi *capital* sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Maka dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan PDRB (Boediono, 1998 dalam Dewi Maharani, 2016).

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan dan jawaban tersebut masih diuji kebenarannya secara empiris. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna untuk mengetahui pengaruh variabel angkatan kerja, rata – rata lama sekolah, dan investasi PMDN juga PMA, sangat berhubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu :

1. Diduga variabel Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi seluruh provinsi di Pulau Jawa.
2. Diduga variabel Rata – Rata Lama Sekolah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi seluruh provinsi di Pulau Jawa.
3. Diduga variabel Investasi PMA berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi seluruh provinsi di Pulau Jawa.
4. Diduga variabel Investasi PMDN berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi seluruh provinsi di Pulau Jawa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif.

##### **3.1.1. Deskriptif Kuantitatif**

Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 3) bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

#### **3.2. Definisi dan Operasional**

##### **3.2.1. Definisi Variable**

Definisi variabel ini bertujuan untuk lebih memperjelas makna dari penulisan skripsi yang berjudul “PENGARUH ANGKATAN KERJA, RATA – RATA LAMA SEKOLAH, DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT TAHUN 2000 - 2020”

dan akan memberikan batasan-batasan analisis selanjutnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel yaitu :

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel dependen yaitu variabel yang keragamannya dipengaruhi variabel lain di dalam model.
2. Variabel Angkatan Kerja diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen di dalam model.
3. Variabel Rata – Rata Lama Sekolah diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen di dalam model.
4. Variabel Investasi , diklasifikasikan sebagai berperan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen di dalam model.

### **3.2.2. Operasional Variable**

Dalam operasional variabel ini diuraikan arti dari beberapa variabel yang berhubungan dengan pembahasan, antara lain :

**Tabel 3.1. Opersional Variabel**

**Tabel 3.1. Opersional Variabel**

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Variabel	Satuan
dependen (Y)	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi, peningkatan dalam kemampuan dari suatu ekonomi adalah memproduksi barang dan jasa	Persen

		Provinsi Jawa barat	
Independen (X1)	Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat	jiwa
Independen (X2)	Rata – Rata Lama Sekolah	Mengindikasikan makin tinggi pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah	persen
Independen (X3)	Investasi	Pengeluaran untuk membeli barang – barang modal dan peralatan produksi	Persen

### 3.1. Data Penelitian

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dalam time series. Data time series penelitian ini dengan periode waktu 20 tahun yaitu dari tahun 2010 – 2019. Data sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Data Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2000-2020
- b. Data Angkatan Kerja tahun 2000- 2020
- c. Data Rata – Rata Lama Sekolah Jawa Barat tahun 2000 - 2020
- d. Data Investasi Provinsi Jawa Barat tahun 2000 – 2020

### **3.4. Model Penelitian**

Dalam menganalisa pengaruh konsumsi pemerintah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi Jawa Barat, kami menggunakan metode analisis time series dengan struktur model sebagai berikut:

$$PE_t = \beta_0 + \beta_1TK_t + \beta_2AK_t + \beta_3LPE_t + \epsilon_t$$

Dimana:

PE: Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

AK : Angkatan Kerja (Jiwa)

RLS : Rata – Raata Lama Sekolah (persen)

INV : Investasi ( Persen)

E : Error Term t : Periode Waktu

### **3.5. Metode Analisis Regresi Data Time Series**

#### **3.5.1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa : “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel tidak terikat, variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Hipotesis yang digunakan 1.  $H_0 = 0$  : data residual berdistribusi normal. 2.  $H_1 \neq 0$  : data residual tidak berdistribusi normal • Dalam uji ini kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu: Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal. • Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka distribusi data normal

### **3.5.2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi yang ditemukan terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gozali, 2009). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar scatterplot antara nilai prediksi variabel bebas ZPRED (nilai prediksi, sumbu X) dengan residualnya SRESID (nilai residualnya, sumbu Y) dengan cara sebagai berikut :

1. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka nol.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. Berikut kriteria pengujian untuk menjawab hipotesis:
  - a.  $H_0$ : Tidak ada gejala heteroskedastisitas

b.  $H_a$ : Ada gejala heteroskedastisitas

c.  $H_0$  diterima apabila nilai p value atau signifikansi  $> 0,05$ .

Jadi kesimpulannya apabila pada grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas

### **3.5.3. Uji Multikolinearitas**

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier sempurna atau pasti diantara variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel tidak terikat. Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel tidak terikat. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Dengan hipotesis sebagai berikut:

-  $H_0 = 0$  : tidak terdapat multikolinieritas

-  $H_1 \neq 0$  : terdapat multikolinieritas

Dengan kriteria uji sebagai berikut :

- Apabila nilai VIF  $> 10$  maka terjadi multikolinieritas.
- Apabila VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas

### **3.5.4 Uji Autokorelasi**

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai terjadinya korelasi antara data pengamatan, atau dengan perkataan lain munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Autokorelasi

digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Adanya autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi berganda, yaitu bahwa tidak ada korelasi diantara galat puncaknya. Berarti, jika ada autokorelasi maka secara intuisi dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh dikatakan kurang akurat. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat digunakan angka Durbin-Watson (DW)

Uji korelasi Durbin-Watson dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya serial korelasi antar variabel tidak terikat. Untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan nilai DW yang dihasilkan pada tabel dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- $H_0 = 0$  : Tidak ada autokorelasi
- $H_1 \neq 0$  : Terdapat autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson(D-W): Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan nilai  $d$  dari tabel Durbin-Watson menurut Imam Ghazali, 2013. Sebagai berikut:

1. Jika  $0 < d < d_L$  maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada autokorelasi positif (tolak).
2. Jika  $d_L \leq d \leq d_U$ , maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada autokorelasi positif (no decision).
3. Jika  $4 - d_L < d < 4$ , maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada korelasi negatif (tolak).
4. Jika  $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ , maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada korelasi negatif (no decision).
5. Jika  $DW < 4 < 4 - d_U$ , maka kesimpulannya hipotesis nol tidak ada autokorelasi positif atau negatif (tidak ditolak).

### **3.5.5. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )**



Menurut (Ghozali, 2013) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ) dengan ketentuan:

- Jika  $R^2$  mendekati angka 1, maka variasi dari variabel – variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebasnya.

- Jika  $R^2$  semakin menjauhi angka 1, maka variasi dari variabel – variabel terikatnya semakin tidak dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebasnya.

### **3.5.6. Uji Signifikansi (Uji F)**

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dibuat hipotesis

**Tabel 3.2. Uji Signifikansi (Uji F)**

H <sub>0</sub>	$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$	Artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi, Laju Angkatan Kerja secara Bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks Rata – Rata Lama Sekolah
H <sub>1</sub>	$\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 = 0$	Artinya variabel Angkatan Kerja, Rata – Rata Sekolah, Investasi secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima artinya secara Bersamasama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak artinya secara Bersamasama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

**3.5.7. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel terikat. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila  $H_0$  ditolak pasti  $H_1$  diterima (Sugiyono, 2012:87). Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuat hipotesa:

**Tabel 3.3. Uji Parsial (Uji T )**

H <sub>0</sub>	$\beta_1 = 0$	Artinya variabel Angkatan Kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi
H <sub>1</sub>	$\beta_1 \neq 0$	Artinya variabel Angkatan Kerja secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
H <sub>0</sub>	$\beta_2 = 0$	Artinya variabel Rata – Rata Lama Sekolah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
H <sub>1</sub>	$\beta_2 \neq 0$	Artinya variabel Rata – Rata Lama Sekolah secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi.
H <sub>0</sub>	$\beta_3 = 0$	Artinya variabel Investasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $-t$  hitung  $< -t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya tidak ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat





